



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KAJI ULANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2023

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Januari 2023, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh masing-masing jamaah (Bipih) Tahun 1444 H/ 2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara sisanya yang 30 persen diambilkan dari nilai manfaat dana haji yang telah disetorkan jamaah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyuarakan hal yang sama dengan Kemenag terkait kenaikan Bipih 2023. Menurut Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, jika tidak ada perubahan komposisi maka jamaah haji yang belum berangkat akan menanggung kerugian akibat tidak dinaikkan biaya ibadah haji. Selama ini biaya haji yang dibayarkan jamaah terasa lebih ringan karena disokong nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, jumlah nilai manfaat yang digelontorkan BPKH untuk 'subsidi' jamaah haji dikeluarkan secara berlebihan sehingga ke depan justru akan merugikan.

Nurul Gufron mencontohkan pada penyelenggaraan ibadah haji 2022, pengeluaran dana manfaat membengkak karena biaya operasional di Arab Saudi meningkat. Saat itu, BPKH harus menanggung 60 persen dari total biaya haji sehingga menggerus cadangan nilai manfaat. Kondisi ini jika diteruskan akan menjadi bom waktu karena dana haji yang dikelola BPKH akan habis terforsir untuk menutupi biaya jamaah haji yang telah berangkat. Pendapat ini perlu dipertimbangkan mengingat KPK telah melakukan kajian optimalisasi pengelolaan dana haji oleh BPKH pada 2019 dan kajian efisiensi biaya operasional haji secara umum, baik di tanah air maupun di Arab Saudi pada 2020.

Dibanding dengan tahun 2022, usulan BPIH 2023 ini hanya mengalami kenaikan sebesar Rp514.888,02. Perbedaannya terdapat pada komposisi pembiayaan. Secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jamaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi). BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat sebesar Rp58.493.012,09 (59,46 persen). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen). Dengan demikian, ada kenaikan biaya yang harus dibayarkan jamaah dari Rp39.886.009,00 tahun 2022 menjadi Rp69.193.734,00 sebagai usulan tahun 2023. Kenaikan yang nilainya hampir dua kali lipat tentu saja sangat memberatkan mengingat jangka waktu calon jamaah untuk melunasi hanya tersisa sekitar 3 bulan sebelum keberangkatan.

Dari pembahasan terlihat bahwa manajemen penyelenggaraan haji sangat rumit. Sayangnya manajemen yang rumit tidak diimbangi dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik dari Pemerintah. Kebijakan haji pemerintah juga masih terlihat lemah. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga kini terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang tidak menentu. Apalagi ditambah dengan terjadinya krisis pangan dan energi dunia akibat dari perang Rusia-Ukraina. Penyelenggaraan haji pun terkena dampak, biaya transportasi, akomodasi, dan lainnya yang harus ditanggung jemaah yang datang ke Kota Suci Makkah dan Madinah ikut merangkak naik.

Atensi DPR

Komisi VIII perlu mendorong Kemenag untuk mengkaji ulang rencana kenaikan Bipih 2023 dengan mengubah komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat. Dampak dari pengubahan komposisi ini tentu sangat memberatkan jemaah mengingat komposisi pada 2022 masih 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat. Efek dari perubahan formula komposisi pembiayaan tersebut adalah biaya haji yang dikeluarkan jemaah naik secara signifikan. Apabila tahun 2022 lalu Bipih hanya Rp39.886.009,00 sementara untuk tahun 2023 menjadi Rp69.193.733,60. Masyarakat umum, terutama calon jemaah, tentunya akan fokus pada kenaikan Bipih dan tidak akan memperhatikan bahwa BPIH hanya naik rerata Rp514.888,02. Oleh karena itu, Komisi VIII juga perlu mendorong Kemenag melakukan sosialisasi dan komunikasi publik secara intensif terkait dengan komposisi BPIH sehingga calon jemaah haji tidak kaget dan mempunyai waktu yang cukup untuk melunasi Bipih 2023.

Sumber

ccnindonesia.com, 19 Januari 2023;
kompas.id, 19 Januari 2023;
kompas.com, 30 Januari 2023.